

PERANAN KELEMBAGAAN BAGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA NON MATERIAL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PERDESAAN

¹Mansur Afifi dan ²Sitti Latifah

- 1) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram
Email: Mansurafifi@yahoo.de
- 2) Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Email: Sittilatifah@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi model dan menganalisis peran kelembagaan bagi pengembangan sumber daya non material dalam mendukung pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan di kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dan jumlahnya ditentukan dengan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan perdesaan yang mengembangkan sumber daya non material di samping dapat mewujudkan partisipasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan juga melahirkan berbagai aksi bersama (*collective action*) dari masyarakat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya (*emergence property*). Berbagai kesepakatan bersama yang dihasilkan tersebut dihayatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama (publik) dan ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kelembagaan bagi pengembangan sumber daya non material perlu terlebih dahulu diwujudkan sebelum program teknis diimplementasikan di desa.

Kata Kunci: kelembagaan, pembelajaran rekognitif, sumber daya non material, dialog bersama dan aksi bersama.

THE ROLE OF INSTITUTION FOR THE DEVELOPMENT OF NON-MATERIAL RESOURCES IN SUPPORTING RURAL DEVELOPMENT

ABSTRACT. The aims of this study are to identify the model and analyze the role of institution for the development of non-material resources in supporting rural development. The research was conducted in three subdistricts in West Lombok district West Nusa Tenggara. The research approach used in this study is a qualitative approach. Informants are determined based on purposive sampling method and the number is determined by the method of snowball sampling. Data collection techniques used were observation, participant observation, and in-depth interviews. Data analysis was conducted through four stages including data

reduction, presentation, interpretation, and verification (drawing conclusions). The results indicate that the development of rural institution advancing non-material resources has not only increased participation, effectiveness, efficiency and sustainability but also produced community collective actions which have never been imagined previously (emergence property). Various generated agreements are intended to satisfy the public needs and it is in line with the objectives of development undertaken by government. Therefore, institution for the development of non-material resources should be established in the village prior to the implementation or introduction of the technical development programs.

Key words: institution, recognitive learning, non material resources, community dialogue and collective action.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masyarakat perdesaan relatif lebih parah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan di wilayah perdesaan yang didominasi oleh petani secara umum disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sangat kecil dan posisi subordinasi petani ketika berhadapan dengan dominasi alam, teknologi dan kelembagaan. Pada tahun 1980-an kepemilikan lahan rata-rata di Jawa adalah kurang dari 0,5 hektar (ha) dan kini hanya tinggal 0,25 ha per kepala keluarga petani (Hayami, 1997). Akibatnya, struktur pendapatan petani didominasi oleh pendapatan di luar kegiatan pertanian (*off-farm*) seperti kuli bangunan, ojeg, membuka toko, sektor informal dan sebagainya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 88% rumah tangga (RT) petani menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Keuntungan semusim yang diperoleh RT petani berkisar antara Rp 325.000 - Rp 543.000 atau hanya Rp 81.250 - Rp 135.000 per bulan. Jika setiap RT memiliki anggota 5 orang maka pendapatan per kapita petani hanya sekitar Rp 25.000 per bulan atau setara dengan Rp 300.000 per tahun (ini lebih rendah UMR per bulan sektor formal). Fakta ini menunjukkan rendahnya kualitas hidup petani dan pelaku ekonomi di sektor pertanian akan kehilangan insentif untuk melakukan kegiatan produksi. Kenyataan ini membawa implikasi yang sangat kompleks pada perekonomian negara dimana salah satunya adalah mengubah Indonesia dari negara yang berswasembada pangan menjadi negara pengimpor beras.

Kelembagaan di sektor pertanian menempatkan petani dalam kondisi terlemah. Dalam relasi antara penggarap dengan pemilik lahan, seringkali sistem bagi hasil yang disepakati lebih banyak menguntungkan pemilik lahan di mana proporsi yang diperoleh pemilik lahan jauh lebih besar dibandingkan dengan proporsi pendapatan yang diterima penggarap. Jika tidak setuju risikonya adalah menganggur. Dalam sistem sewa lahan, petani penyewa juga tidak dalam posisi yang menguntungkan akibat ketidakpastian panen dan harga jual produk pertanian. Jika panen gagal dan harga anjlok, petani akan rugi besar karena harus membayar

Peranan Kelembagaan Bagi Pengembangan Sumber Daya Non Material dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Mansur Afifi Dan Sitti Latifah)

sewa lahan ditambah kerugian gagal panen. Dalam hubungan dengan pemerintah, seringkali bahwa kebijakan yang menguntungkan pun tetap dirasakan sebagai kerugian bagi petani. Misalnya, kredit dan subsidi input ketika sampai di petani telah disunat ataupun dikuasai oleh sekelompok orang (lembaga) sehingga subsidi menjadi tidak bermakna (Yustika, 2003).

Kondisi kemiskinan di perdesaan diperparah oleh persoalan lainnya seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan masih kurangnya prasarana dan sarana dasar.

Selama ini, ketika kita berbicara masalah kelembagaan petani yang selalu muncul dalam benak kita adalah institusi yang berfungsi menyediakan berbagai kebutuhan petani yang bersifat material seperti sarana produksi pertanian dan modal usaha. Akibatnya, kelembagaan perdesaan yang dimaksud hanyalah berputar pada institusi ekonomi seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, institusi yang mengurus kebutuhan lainnya seperti air, dan institusi sosial lainnya. Oleh karena itu, berbagai program pemerintah lebih cenderung kepada pengembangan institusi material di mana pendekatan yang digunakan lebih bersifat teknis. Persoalannya kemudian adalah apakah pendekatan teknis tersebut secara inheren dapat melahirkan efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan (sustainability) dari institusi tersebut?

Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat bahwa sejatinya persoalan kemiskinan di perdesaan tidak hanya terkait dengan persoalan material melainkan juga persoalan non material. Institusi-institusi yang dibangun oleh pemerintah belum mampu membangun sumber daya non material sehingga institusi tersebut tidak memiliki tingkat efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan yang tinggi. Terkait dengan hal tersebut, maka makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus pengalaman bagaimana mengembangkan institusi yang mampu membangun sumber daya non material sehingga efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan dari institusi tersebut dapat dijamin. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Mataram (Unram) telah melakukan pengembangan terhadap pendekatan *Strategic Leadership Learning Organization* (SLLO) dalam upaya mendorong tumbuhnya sumber daya non material pada berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan tersebut telah berhasil menstimulasi perubahan-perubahan baik pada tataran individu, kelompok, maupun institusi masyarakat. Penelitian ini, oleh karena itu, bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi model kelembagaan bagi pengembangan sumber daya non material guna mendukung pembangunan perdesaan; dan (ii) menganalisis peranan kelembagaan bagi pengembangan sumber daya non material dalam mendukung pembangunan perdesaan.

KOMPLEKSITAS KEGIATAN EKONOMI

Berbagai fakta kompleksitas kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan berkaitan dengan kekuasaan. Beberapa contoh yang dapat diamati antara lain: *Pertama*, peternak sapi menjual seliter susu seharga Rp 2500,- ke tengkulak, tengkulak menjual seharga Rp 3500,- ke distributor, distributor menjual ke toko Rp 5000, dan toko menjual Rp 7000,- ke konsumen; *Kedua*, pelaku sektor informal di Lima (Peru) harus menunggu selama 289 hari dan melakukan dua kali penyogokan untuk mendapatkan surat izin pendirian usaha, sementara pengusaha besar cuma perlu sehari untuk mendapatkan secarik kertas serupa; *Ketiga*, buruh dibayar dengan patokan kebutuhan hidup minimal, sementara manajer (dan pemilik modal) berdasarkan keuntungan perusahaan; *Keempat*, pelaku sektor industri (industriawan) sangat gampang mendapatkan keringanan pajak (*tax holiday*), sementara subsidi bagi pelaku sektor pertanian (petani) setiap waktu terus digerogoti jumlahnya (Yustika, 2009); dan Kelima, di sektor industri, gaji direksi (manajemen) berdasarkan laba perusahaan sementara gaji buruh ditentukan atas dasar upah minimum regional (UMR) yang setara dengan kebutuhan fisik minimum.

Struktur pasar dan kelembagaan di sektor perikanan mencerminkan bahwa relasi antar pelaku ekonomi tidaklah seimbang. Pasar komoditas perikanan antar daerah, nasional dan ekspor dikuasai oleh hanya sedikit pedagang besar (oligopolis) di mana merekalah yang menentukan harga jual di pasar. Kelembagaan yang ada memungkinkan pedagang perantara memperoleh profit margin yang besar (bisa lebih dari 50%). Harga ikan di pasar sering mengalami fluktuasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, nisbah ekonomi antara pemilik kapal dan jaring dengan nelayan buruh sangat timpang.

Kelembagaan ekonomi termasuk aturan main (*role of game*) yang kurang tepat berimplikasi pada hubungan yang asimetris di antara pelaku ekonomi. Contoh, petani budi daya ikan mas koi menjual kepada pedagang hanya Rp 400 per ekor. Padahal setelah dipelihara pedagang selama satu bulan mampu dijual dengan harga mencapai Rp 14.000 per ekor. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama sebulan tidak lebih dari Rp 2.600 per ekor. Selain itu, harga ikan di pasar selama ini selalu fluktuatif sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Pada tahun 2002, misalnya, harga ikan teri mencapai Rp 27.000 per kilogram. Tetapi, pada tahun 2003 terjadi penurunan harga ikan teri menjadi Rp 4.000 per kilogram (Afifi, 2005). Hal ini diperparah lagi oleh kehadiran ikan teri impor yang menguasai pasar dalam negeri. Fakta ini menjadi bukti bahwa pemerintah kurang serius membenahi tata niaga komoditas perikanan dengan memberikan perlindungan terhadap nelayan tradisional dan petani gurem.

Dalam kasus impor beras, misalnya, petani menjadi pihak yang dirugikan. Dengan hadirnya beras impor berarti menambah suplai (persediaan) beras di pasar.

Peranan Kelembagaan Bagi Pengembangan Sumber Daya Non Material dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Mansur Afifi Dan Sitti Latifah)

Akibatnya harga beras turun dan pada akhirnya pendapatan petani menjadi berkurang. Menurunnya pendapatan petani membawa dampak pada hilang insentif berproduksi. Petani tidak tertantang untuk meningkatkan produksi lantaran keuntungan yang akan diperoleh tidak lagi menarik. Produksi padi nasional menurun. Kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dengan beras impor. Ke depan, bangsa kita tidak dapat berswasembada beras. Ketahanan pangan yang kemudian ditingkatkan menjadi kedaulatan pangan sebagai orientasi pembangunan pertanian hanya sekadar menjadi pemanis dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam mengelola komoditas strategis seperti beras dan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida, pemerintah menetapkan kebijakan harga dasar (*floor price*) gabah dan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk dan pestisida. Harga dasar gabah dimaksudkan agar keuntungan yang diperoleh petani tidak berkurang manakala terjadi panen raya. Pada saat panen raya, suplai beras di pasar meningkat dan cenderung menurunkan harga. Melalui regulasi, pemerintah menetapkan harga tertentu untuk gabah guna menjadi kestabilan harga dan mencegah terjadinya permainan harga oleh para spekulasi dan pencari rente (*rent seeker*). Kebijakan ini akan efektif jika pemerintah memiliki kemampuan untuk membeli seluruh produk petani dengan harga yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka mekanisme pasar yang akan terjadi, di mana peningkatan suplai akan diikuti oleh penurunan harga. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan harga gabah akibat dari keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menampung produksi padi pada saat panen raya.

Hal yang sama terjadi pada harga pupuk dan pestisida. Pada saat musim tanam tiba, permintaan pupuk dan pestisida melonjak. Peningkatan permintaan menggerakkan harga pupuk dan pestisida ke atas. Untuk mencegah kenaikan harga yang tak terkendali, melalui regulasi pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Kebijakan ini tidak efektif mengingat suplai pupuk dan pestisida pada saat musim tanam tidak memadai akibat dari kesalahan tata niaga. Pada saat musim tanam tiba, pupuk dan pestisida mengalami kelangkaan di pasar. Berapa pun harga administratif yang ditetapkan tidak akan efektif melawan kenaikan harga riil jika persediaannya di pasar terbatas. Petani akan berebut membelinya dengan harga yang tinggi karena jika tidak maka ia akan kehilangan kesempatan untuk berproduksi padi pada musim itu.

Dari uraian di atas fenomena kemiskinan dapat dilokalisasi sebagai persoalan kelembagaan. *Pertama*, ternyata tidak ada kesetaraan kekuatan antar pelaku ekonomi (kasus relasi peternak susu, tengkulak, dan pemilik toko). *Kedua*, ketidaksejajaran kemampuan untuk melakukan "manipulasi" terhadap kebijakan publik (kasus izin investasi bagi sektor informal dan pengusaha besar). *Ketiga*, interaksi yang asimetris antara *principal* dan *agent* untuk membuat kesepakatan ikatan kerja (kasus buruh dan pemilik modal). *Keempat*, ketimpangan kekuatan dalam mendesak dan mempengaruhi kebijakan publik (kasus pajak dan subsidi untuk sektor industri dan pertanian) (Yustika, 2003). Sampai batas tertentu kemiskinan

bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya (alam, pendidikan, keterampilan) dan kultur (budaya malas bekerja). Tapi ini hanyalah penyebab sekunder, selebihnya terdapat alasan di luar itu yang lebih bersifat struktural. Dengan kata lain, semua itu adalah penyebab derivatif dari keterbatasan sumber daya non material.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA NON-MATERIAL

Dalam perspektif pembelajaran rekognitif (*recognitive learning*), kemiskinan merupakan *symptoms* atau *undesired effect* (efek yang tidak diinginkan) dari persoalan sosial yang ada di masyarakat. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kelangkaan atau tidak teralokasikannya sumber daya material secara merata tetapi lebih disebabkan oleh kelangkaan sumber daya non material. Sumber daya non material terdiri dari *knowledge, skills*, reputasi, jaringan sosial, dan sumber daya spiritual (*spiritual resources*). Sumber daya spiritual meliputi rasa haus akan ilmu pengetahuan, visi terhadap kesempatan, etika kerja, kepekaan terhadap disiplin, solidaritas kekeluargaan, solidaritas dalam komunitas, dan iktikad baik (etika penuh kebaikan).

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membangun atau menumbuhkan sumber daya non material. Sumber daya non material ditumbuhkan melalui proses pembelajaran. Ada dua tahapan pembelajaran yaitu *first order learning* (pembelajaran pada level pertama) dan *second order learning* (pembelajaran pada level kedua). Pembelajaran pada level kedua adalah belajar atau mempelajari hal-hal yang bersifat kognitif. Adapun pembelajaran pada level pertama adalah belajar di ranah komunikasi untuk memperoleh kompetensi generik. Pembelajaran level pertama inilah yang dikenal dengan istilah pembelajaran rekognitif. Pembelajaran rekognitif adalah proses yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang, karena setiap orang harus berkomunikasi setiap hari (LPP, 2004).

Pembelajaran rekognitif berlangsung dalam institusi komunikasi atau dialog. Dialog adalah bengkel tempat berlatih kejujuran dan keikhlasan demi kebenaran. Komunikasi atau dialog adalah institusi yang tidak bisa dihindari dan kita setiap saat berada di dalamnya. Tujuan komunikasi adalah untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran subyektif yang dimiliki setiap orang yang melakukan komunikasi. Komunikasi dalam pengertian ini adalah tujuan, bukan sarana. Bila komunikasi adalah sarana, maka partisipan yang terlibat di dalamnya adalah juga sarana. Konsekuensi dari komunikasi adalah tindakan sosial (*collective action*).

Kesepakatan sebagai hasil dari komunikasi bersifat mengikat (*binding and bonding*). Untuk terjadinya komunikasi yang melahirkan kesepakatan dan tindakan sosial maka setiap partisipan yang terlibat dalam komunikasi harus menaati dan mematuhi aturan (*rule*) dari komunikasi atau dialog. Ada dua aturan atau prinsip utama yang harus diikuti yaitu: *Pertama*, setiap orang belajar tidak mengatakan atau melakukan apa yang diyakininya salah. *Kedua*, lakukan apa yang telah anda sepakati. Bila kesepakatan tidak dilakukan, maka Prinsip Utama telah dilanggar.

Peranan Kelembagaan Bagi Pengembangan Sumber Daya Non Material dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Mansur Afifi Dan Sitti Latifah)

Komunikasi dengan tujuan mencari kebenaran inter-subyektif melahirkan nilai-nilai egaliter, terbuka, sabar, berani, bebas, saling menghargai, demokratis, saling percaya, dan lain-lain. Komunikasi berada di ranah relasional (ranah hubungan antar individu). Bila komunikasi adalah institusi primer untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, maka sirkularitas komunikasi akan terjamin. Komunikasi bersifat *recursive* (berulang-ulang dan terus-menerus). Kebenaran adalah *attractor* (penarik) komunikasi. Keterhubungan antar individu adalah *emergent* (hasil) dari proses komunikasi yang berulang-ulang dan terus-menerus tersebut.

Komunikasi adalah ranah/arena individu membangun keterhubungan atau hubungan yang saling berterima (*structural coupling*) dengan sesama. Hubungan saling berterima terjadi bila emosi semua partisipan dalam komunikasi selalu dalam keadaan rileks (lentur). Ketika emosi berada dalam keadaan lentur (tenang) potensi kecerdasan bisa bekerja optimal. Kebenaran akan lebih mudah kita lihat. Dengan demikian, kita belajar melihat lawan bicara kita memiliki nilai kemanusiaan yang sama dengan kita. Sebaliknya, emosi yang tegang karena takut, marah, dengki, dendam, dan lain-lain melahirkan opsi kecerdasan hubungan yang terbatas. Hubungan yang lahir bersifat asimetris, dan ini akan dilihat sebagai kebenaran. Emosi yang tegang menghambat lahirnya pemahaman bersama (*shared understanding*) dan kebenaran intersubyektif (bersama). Dalam setiap tindak komunikasi identitas sistem sosial terbangun dan dipertahankan. Proses komunikasi menjadi proses pembelajaran sehingga setiap orang dapat belajar dari orang lain dan setiap orang menjadi guru bagi yang lainnya (Zuber-Skerritt, 2002).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk mengidentifikasi model kelembangan yang dikembangkan untuk membangun sumber daya non material pada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk menganalisis perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada kelompok masyarakat setelah dilakukan intervensi oleh LPP Unram.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu kecamatan Tanjung, kecamatan Kediri, dan kecamatan Narmada di kabupaten Lombok Barat. Pada setiap kecamatan, kecuali kecamatan Narmada dibentuk *core team* (kelompok inti) yang terdiri dari aparat pemerintah kecamatan, aparat desa (kepala desa, dan kepala dusun), tenaga kesehatan di tingkat kecamatan (dokter Puskesmas, bidan desa, dan kader kesehatan). Sementara itu, informan atau narasumber yang di ambil dengan menggunakan pendekatan purposive sampling yaitu terdiri dari aparat desa, tenaga kesehatan dan masyarakat. Jumlah informan didasarkan pada pendekatan "*snowball sampling*". Jika data dianggap masih kurang maka dilakukan penambahan informasi dari informan lainnya sehingga informasi atau data yang dikumpulkan menjadi jenuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), observasi partisipatif, dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Observasi

partisipatif dilakukan pada saat *core team* melakukan kegiatan *community dialog* (dialog bersama). Selain itu, peneliti juga terlibat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LPP Unram mulai dari pelatihan, mentoring, dan evaluasi sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Adapun tahapan analisis data kualitatif yang dilakukan terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Dengan cara tersebut, model kelembagaan yang dikembangkan untuk membangun sumber daya non material masyarakat dapat dideskripsikan. Selain itu, hasil (emergent) dari proses dialog komunitas (*community dialog*) berupa aksi bersama (*collective action*) dapat diidentifikasi dengan seksama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dibagi dalam tiga sub bagian yaitu strategi dan pendekatan dalam pembelajaran yang diterapkan, uji coba (*try out*) pembelajaran rekognitif, dan hasil yang dicapai.

Strategi dan Pendekatan dalam Pembelajaran

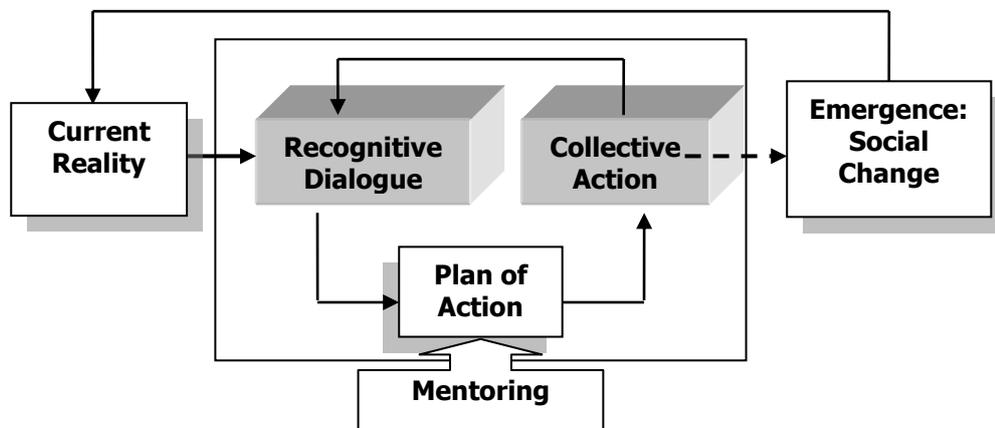
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan diadopsikan dari model kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Figueroa (2002) dengan beberapa modifikasi. Model ini dipilih karena pada dasarnya model ini memberikan penekanan yang besar pada kepemilikan masyarakat terhadap proses dan isi komunikasi, peran masyarakat terhadap perubahan dirinya sendiri, dan dialog horizontal mengenai berbagai isu yang ada di masyarakat. Fokus dari model ini tidak hanya pada hasil yang berkaitan dengan perubahan perilaku, tetapi juga pada berbagai aspek berkaitan dengan norma, budaya, dukungan lingkungan, kebijakan dan lain-lain yang berkaitan dengan kompleksitas dinamis dari sistem sosial.

Sebagai katalis, sebuah intervensi untuk berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, institusi masyarakat, dan rumah tangga dilakukan melalui pelatihan selama 2 hari. Materi pelatihan yang diberikan adalah materi dasar pembelajaran rekognitif mencakup pembelajaran rekognitif, model mental, berpikir sistem, visi bersama, pemampuan pribadi, pembelajaran tim, teori hambatan dan analisis akar masalah. Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut mengasumsikan bahwa persoalan terbesar yang dihadapi oleh berbagai institusi terletak pada cara masyarakat dalam institusi tersebut melihat dunia mereka. Dalam banyak kasus, persoalan yang kita hadapi sesungguhnya bukan berada di luar kita tetapi ia berada dalam pikiran kita dalam cara kita berpikir. Persoalan ini dieksplorasi melalui disiplin pemampuan diri, model mental, dan berpikir sistem. Ketiga disiplin ini adalah disiplin yang dapat kita pelajari secara individu. Terdapat pula disiplin-disiplin yang tidak secara langsung berkaitan dengan individu semata, tetapi kepada individu sebagai kelompok atau institusi yaitu visi bersama dan

Peranan Kelembagaan Bagi Pengembangan Sumber Daya Non Material dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Mansur Afifi Dan Sitti Latifah)

pembelajaran tim. Kelima disiplin ini diperlukan dalam upaya mengembangkan organisasi pembelajaran.

Penting untuk dicatat bahwa pelatihan yang diberikan pada awal kegiatan hanya bersifat undangan untuk mulai belajar sehingga peserta/partisipan dikenalkan kepada konsep dasar kelima disiplin tersebut dan pembelajaran rekognitif yang merupakan dasar filosofis dari organisasi pembelajaran dan kepemimpinan strategis. Setelah pelatihan, diharapkan partisipan secara individu maupun kelompok melakukan translasi materi pelatihan dengan mengaplikasikan konsep inti dari materi-materi tersebut di dalam lingkungan kerja mereka. Proses translasi ini dilakukan melalui dialog rekognitif (*recognitive dialogue*) yang terus-menerus (berkesinambungan) dengan mematuhi aturan dialog yang disepakati. Kesepakatan yang diperoleh melalui dialog tersebut dirumuskan dalam suatu rencana aksi (*plan of action*) dan kemudian diwujudkan dalam aksi bersama (*collective action*). Jika terjadi persoalan dalam aksi bersama, maka persoalan tersebut dipecahkan melalui dialog rekognitif. Dengan demikian terjadi proses sirkularitas antara melakukan dialog kemudian menyusun rencana aksi dan melakukan aksi bersama. Kegiatan ini terus dilakukan dan tidak berhenti sehingga komunikasi yang terbentuk di antara individu pembelajar dalam proses ini bukan lagi sekadar menjadi sarana mencapai tujuan tetapi bahkan menjadi tujuan yang ingin diraih. Melalui proses ini diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama oleh masyarakat didiskusikan dalam aktivitas dialog tersebut agar persoalan tersebut dapat diatasi. Perubahan akan terjadi selama dalam proses dialog rekognitif dan aksi bersama yang menyangkut perubahan individu, masyarakat dan institusi di mana individu pembelajar tersebut berada.



Gambar 1. Kerangka Pendekatan Kegiatan

Ujicoba Pembelajaran Rekognitif

Berbagai macam kebijakan dan program baik yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas/kesejahteraan masyarakat di NTB belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena dampak yang ditimbulkan masih sangat terbatas. Selain itu, keberlanjutan program tidak dapat dipertahankan karena program lebih berorientasi kepada persoalan teknis (*technical aspect*) tanpa memperhatikan aspek rekayasa sosial (*social engineering*). Padahal, jika ingin membangun dasar yang kuat untuk keberlanjutan program maka program pembangunan (peningkatan kesejahteraan masyarakat) seyogyanya memperhatikan perspektif pelaku yaitu masyarakat, rumah tangga dan pemerintah. Artinya, sebelum program diimplementasikan dilakukan terlebih dahulu persiapan sosial yang membuka ruang bagi terjadinya interaksi di antara ketiga *stakeholders* tersebut. Adanya interaksi yang terus-menerus di antara ketiga *stakeholders* tersebut merupakan syarat bagi keberhasilan pembangunan. Melalui proses interaksi ini akan melahirkan pemahaman bersama (*shared understanding*) yang kemudian memunculkan adanya kesepakatan bersama (*shared agreement*) dan menjadi dasar penyusunan program bersama. Implementasi program yang telah disepakati bersama kemudian menjadi lebih mudah karena semua *stakeholders* sudah bersepakat sehingga memudahkan mereka untuk saling mengontrol.

Selama ini, jika pun ada interaksi antara ketiga *stakeholders* tersebut semata-mata disebabkan oleh tuntutan dari program yang ingin diimplementasikan bukan berasal dari kesadaran akan adanya persoalan bersama. Akibatnya, keberlanjutan (sustainability) program tidak terjamin karena interaksi yang muncul tidak murni dari kesadaran dan keinginan masyarakat dan tidak dilakukan secara terus menerus. Interaksi yang terus-menerus di antara ketiga *stakeholders* tersebut pada akhirnya melahirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*) sehingga memungkinkan terjadi keberlanjutan program kesehatan secara swadaya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya yang serius yang dapat menjamin terjadinya proses interaksi secara terus menerus di antara ketiga *stakeholders* tersebut.

Selama ini telah dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram (LPP Unram) suatu model kelembagaan yang dihatatkan untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Model tersebut memungkinkan tumbuhnya kesadaran bersama yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama dan pada akhirnya diwujudkan dengan partisipasi dari semua pihak untuk melakukan kegiatan bersama (*community action*). Model tersebut telah diujicobakan pada tiga bidang yaitu bidang ekonomi (kelompok tani sekitar hutan), pendidikan (SMP, PP, SMK), dan kesehatan (Puskesmas Tanjung dan Puskesmas Kediri). Khusus untuk program kesehatan, kegiatan yang dilakukan dimulai dari pelatihan kelompok sasaran di level desa dan kecamatan khusus. Setelah selesai pelatihan, kelompok sasaran membentuk kelompok pembelajaran masyarakat

(*community learning*) di level desa. Kelompok pembelajaran masyarakat ini kemudian melakukan dialog bersama (*community dialogues*) baik di level desa maupun di level dusun. Peserta dialog terdiri dari kepala-kepala dusun, kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat lainnya. Setiap bulan selama 1 (satu) tahun dilakukan mentoring untuk memberikan masukan selama proses dialog dan memastikan bahwa aturan (*rules*) dalam dialog dipegang oleh peserta dialog. Melalui dialog yang dilakukan secara terus-menerus dihasilkan berbagai kesepakatan yang kemudian direalisasikan melalui tindakan sosial (*collective action*).

Hasil Yang Dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari serangkaian uji coba tersebut dapat dilihat dalam perubahan yang terjadi pada level individu, masyarakat, dan institusi. Pada bagian ini fokus perhatian adalah perubahan yang terjadi pada level masyarakat karena bentuknya sangat konkret dan mudah dilihat dan diidentifikasi. Beberapa perubahan yang terjadi di level masyarakat antara lain adalah muncul forum-forum dialog baik di tingkat desa maupun di dusun (LPP, 2006). Terbentuknya forum-forum dialog di berbagai level menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat bahwa dialog diyakini sebagai kekuatan untuk mengatasi persoalan bersama. Dari dialog yang dilakukan lahir ide dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kegiatan bersama seperti ide untuk mengembangkan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah), banjar sehat, banjar sekolah, TAPAS (Taman Pendidikan Anak Soleh), dan lain-lain.

Di desa Teniga kecamatan Tanjung, misalnya, masyarakat secara bergotong-royong membangun kantor desa berlantai dua (2). Selain itu, masyarakat juga membangun fasilitas MCK (mandi, cuci, dan kakus) secara swadaya. Terakhir, masyarakat bersepakat melakukan penjagaan hutan untuk mencegah terjadinya *illegal logging* (perambahan hutan secara tidak sah). Kesepakatan tersebut muncul karena masyarakat merasakan bahwa hutan desa yang ada harus dijaga mengingat arti pentingnya lingkungan yang baik bagi kehidupan bersama.

Di desa Sigar Penjalin kecamatan Tanjung, masyarakat melakukan pengerasan jalan setapak dengan semen untuk memfasilitasi ibu-ibu yang akan berkunjung ke polindes atau posyandu. Selain itu, masyarakat membangun pipa air bersih 7.012 m dan bak penampungan air (3x2x1,5m), menyewa kantor untuk polindes, dan membentuk arisan yang dihabiskan untuk membantu kegiatan posyandu. Juga masyarakat bersepakat untuk membayar iuran dana sehat secara teratur guna membantu masyarakat yang dalam kesulitan untuk membayar biaya pengobatan.

Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama di desa Sokong kecamatan Tanjung adalah membangun "*beruqaq*" untuk memfasilitasi dialog, membersihkan lingkungan 2 kali seminggu, dan memfasilitasi kegiatan posyandu. Disamping itu, masyarakat membentuk kelompok-kelompok untuk

membantu pendidikan dan kesehatan di beberapa dusun seperti banjar¹ sehat, TAPAS, dan banjar sekolah.

Salah satu hasil yang signifikan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di desa Kediri kecamatan Kediri adalah adanya kesepakatan melakukan diversifikasi dan realokasi dana BAZIS. Selama ini, dana BAZIS dipergunakan untuk menyantuni fakir miskin pada waktu tertentu saja. Setelah pembelajaran rekognitif masyarakat berupaya melakukan reformasi terkait dengan penggunaan dan alokasi dana BAZIS sehingga dana BAZIS dapat dibelanjakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana BAZIS kemudian dialokasikan untuk pembangun 1 (satu) lokal Polindes, beasiswa untuk anak sekolah dari keluarga miskin, dan santunan untuk anak yatim dan orang tua jompo. Selain itu, dana BAZIS diperuntukkan untuk menunjang program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk Balita, bantuan modal bagi pedagang bakulan, perbaikan fasilitas-fasilitas umum seperti perbaikan musholla, dan pemagaran kubur, serta perbaikan rumah bagi warga miskin.

Kasus di desa Lembah Sempage kecamatan Narmada (daerah pinggiran hutan) cukup unik dan menarik. Dari dialog intensif yang dilakukan, masyarakat bersepakat mendirikan lembaga keuangan syari'ah (*Baitul Mal wat Tamwil*/BMT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dana bagi pengembangan modal usaha. Keunikan BMT ini terletak pada kesepakatan untuk meniadakan biaya manajemen karena mereka menganggap BMT sebagai sarana belajar mengenai kejujuran, tolong-menolong, amanah, berbuat kebaikan, dan sebagainya. Pengurus BMT melakukan tugasnya secara sukarela. Aset BMT tumbuh dengan cepat karena kepercayaan masyarakat meningkat. Beberapa kebutuhan masyarakat sudah dapat dipenuhi sehingga rentenir tidak bisa lagi beroperasi di daerah tersebut.

Kemunculan dari berbagai institusi di tingkat lokal atas inisiatif dari warga masyarakat menunjukkan bahwa institusi dialog yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat mampu memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama, saling percaya, dan saling mengasah dan mengasuh. Dari dialog yang mereka lakukan, muncul berbagai kesepakatan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Kesepakatan tersebut terwujud dari berbagai aksi bersama (*collective action*) sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat dipecahkan secara bersama. Keberadaan institusi atau forum dialog dan munculnya berbagai aksi bersama tersebut jelas berperan besar dalam mendukung percepatan pembangunan di desa. Tanpa dukungan dana dari pemerintah, masyarakat telah secara sadar dan mandiri melakukan berbagai kegiatan yang mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, keberadaan berbagai institusi atau forum

¹ Banjar adalah institusi yang bangun oleh masyarakat dimana anggota banjar tersebut bersepakat untuk memberikan kontribusi kepada anggota yang membutuhkan bantuan pada saat tertentu. Banjar sekolah, misalnya, setiap anggota banjar berkewajiban membantu anggota yang membutuhkan dana untuk membayar biaya sekolah anaknya pada periode waktu yang disepakati.

Peranan Kelembagaan Bagi Pengembangan Sumber Daya Non Material dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Mansur Afifi Dan Sitti Latifah)

dialog tersebut dapat dijadikan sebagai katalis dalam melaksanakan pembangunan terutama di perdesaan.

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa model kelembagaan yang dikembangkan untuk membangun sumber daya non material masyarakat adalah institusi dialog (forum dialog) yang memungkinkan masyarakat melakukan dialog bersama dan membangun partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan dapat ditumbuhkan apabila ada kesepahaman dan kesaling-berterimaan di antara para pemangku kepentingan. Kesepahaman dan sikap saling berterima dapat diwujudkan melalui dialog terus-menerus yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan dalam rangka membangun nilai-nilai yang mengandung kebenaran yang diterima secara bersama. Dari kesepahaman tersebut dan melalui aktivitas dialog yang walaupun sesungguhnya merupakan tujuan tetapi kemudian berimplikasi pada munculnya kesepakatan bersama yang kemudian diwujudkan dalam aksi bersama. Berbagai kesepakatan bersama yang dihasilkan tersebut pada akhirnya dihayati untuk memenuhi kebutuhan bersama (publik). Pemenuhan kebutuhan publik inilah yang menjadi tujuan utama dilaksanakan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat.

Salah satu kegagalan dari berbagai program pembangunan selama ini seperti diuraikan di atas adalah tidak adanya pemahaman bersama dan kesepakatan bersama sehingga rasa memiliki di antara pemangku kepentingan tidak ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemahaman bersama dan kesepakatan bersama pembelajaran rekognitif harus diberikan terlebih dahulu sebelum bantuan teknis (proyek) diluncurkan agar partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan sehingga efektivitas, efisiensi, dan sustainability kegiatan tersebut dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, M. 2005. Perbaikan Daya Dukung Sektor Perikanan. dalam, Yustika, AE (ed): *Menjinakkan Liberalisme, Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Figuroa, M. E., Kincaid, D. L., Rani, M., Lewis, G. 2002. *Communication for Social Change: An Integrated Model for Measuring the Process and Its Outcomes*. The Rockefeller Foundation New York USA.
- Hayami, Yujiro. 1997. *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*. Clarendon Press. Oxford.
- Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Mataram. 2004. *Kumpulan Materi Pelatihan Pembelajaran Rekognitif*. LPP, Mataram.

_____. 2006. The Effect of SLLO Training and Mentoring on Reproductive Health Improvement in West Lombok, Indonesia. Research Report, LPP Mataram.

Senge, P. M. 1994. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Currency Doubleday. New York USA.

Yustika, A. E. 2009. Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____. 2003. Negara vs. Kaum Miskin. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Zuber-Skerritt, O. 2002. The Concept of Action Learning. The Learning Organization, 9(3), 114-124.